

STRATEGI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DI TELAGA TUJUH KECAMATAN KARIMUN KELURAHAN SUNGAI LAKAM BARAT KABUPATEN KARIMUN

Asa Bintang Kapiarsa¹, Tri Mardalena², Risma Carolin³, Febriyandi⁴, Waode
Nurmada Aisyah⁵, Sarmi Amanda⁶

¹²³⁴⁵⁶Fakultas sains dan teknologi ,Universitas Karimun Program Studi perencanaan Wilayah dan Kota
Program Studi Perencanaan Wilayah
Email : pwk.42a@gmail.com

uploaded:11/03/2026 revised:11/03/2026 accepted:11/03/2026 published:11/03/2026

Abstrak

Kawasan Telaga Tujuh RW 01 dan RW 03 di Tanjung Balai Karimun menghadapi permasalahan kekumuhan yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab kekumuhan serta merumuskan strategi penanganan. Metode yang digunakan adalah observasi lapangan, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa buruknya drainase, pengelolaan sampah yang tidak optimal, serta rendahnya partisipasi dan kesadaran lingkungan masyarakat menjadi penyebab utama kekumuhan. Rekomendasi meliputi peningkatan infrastruktur dasar, penguatan peran kelembagaan lokal, serta edukasi perilaku hidup bersih untuk mendukung penataan kawasan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Strategi Penanganan, Permukiman Kumuh, Telaga Tujuh, Karimun.

Abstrack

The Telaga Tujuh area in RW 01 and RW 03, Tanjung Balai Karimun, faces significant slum-related challenges influenced by both social and environmental factors. This study aims to analyze the primary causes of slum conditions and formulate appropriate improvement strategies. Using field observations, interviews, and document analysis, the findings show that poor drainage, inadequate waste management, and low community participation are the main contributors to environmental decline. Recommended actions include upgrading basic infrastructure, strengthening local institutions, and promoting environmental awareness to support sustainable area improvement.

Keywords: Slum Upgrading Strategy, Slum Settlement, Telaga Tujuh, Karimun Regency

PENDAHULUAN

Permukiman kumuh merupakan permasalahan perkotaan yang terus berkembang seiring meningkatnya urbanisasi, pertumbuhan penduduk, dan keterbatasan kapasitas pemerintah dalam penyediaan sarana prasarana dasar. UNHabitat (2003) mendefinisikan permukiman kumuh sebagai kawasan hunian dengan kondisi tidak layak, ditandai oleh kepadatan tinggi, bangunan yang tidak memenuhi standar, akses air bersih terbatas, sanitasi buruk, serta minimnya infrastruktur pendukung. Hal ini

menunjukkan bahwa kekumuhan tidak hanya merupakan persoalan fisik, tetapi juga hasil dari interaksi antara faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Menurut Turner (1976), kekumuhan muncul ketika masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk mengelola lingkungan hidupnya secara mandiri dan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa kualitas hunian tidak hanya diukur dari bangunan fisik, tetapi juga dari akses terhadap layanan dasar, keamanan bermukim, dan stabilitas sosial. Sementara itu, Douglas (1983) menegaskan bahwa kawasan kumuh berkembang secara spontan tanpa perencanaan sehingga struktur hunian tidak teratur, fasilitas

tidak memadai, serta rentan terhadap risiko lingkungan seperti banjir dan penyebaran penyakit.

Secara nasional, **Setiawan (2010)** menjelaskan bahwa indikator kekumuhan di Indonesia dapat dilihat dari rendahnya kualitas bangunan, buruknya kondisi jalan lingkungan, sanitasi yang tidak memenuhi standar, serta lemahnya peran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Pendapat serupa dikemukakan oleh **Wijaya (2012)** yang menyebutkan bahwa kekumuhan sering kali diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya kelembagaan lokal, dan ketidakmampuan warga untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan permukiman.

Permasalahan tersebut juga terlihat pada kawasan Telaga Tujuh RW 01 dan RW 03 di Tanjung Balai Karimun, yang menunjukkan kondisi kekumuhan yang cukup signifikan. Ciri-ciri kekumuhan tampak melalui kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas sanitasi yang buruk, drainase yang tidak berfungsi, serta pengelolaan sampah yang tidak terorganisasi dengan baik. Selain faktor lingkungan, aspek sosial seperti rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, minimnya edukasi lingkungan, dan kurang optimalnya peran kelembagaan RT/RW turut memperburuk kondisi permukiman.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara aspek sosial dan kondisi lingkungan sebagai penyebab munculnya kekumuhan. Analisis sosial-lingkungan menjadi penting karena berbagai penelitian membuktikan bahwa penataan fisik saja tidak cukup untuk menghilangkan kekumuhan secara berkelanjutan. Diperlukan keterlibatan masyarakat, penguatan kelembagaan lokal, serta perubahan perilaku agar kualitas permukiman dapat diperbaiki dan dipertahankan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor lingkungan yang mempengaruhi kekumuhan di Telaga Tujuh serta merumuskan strategi penanganan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya penataan kawasan, sekaligus memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian permukiman kumuh di Indonesia.

Berikut **tabel kriteria kekumuhan** yang dapat langsung Anda masukkan ke artikel. Tabel ini mengikuti indikator umum menurut Permen PUPR No.

14/2018 serta diperkuat teori para ahli.

Table 1. Kriteria Pemukiman Kumuh

Kriteria Kekumuhan	Indikator Kekumuhan
Kualitas Bangunan	Bangunan tidak permanen, rapat, dan
Kriteria Kekumuhan	Indikator Kekumuhan
	tidak memenuhi standar.
Jalan Lingkungan	Jalan sempit, rusak, tidak berpaving.
Drainase	Drainase tersumbat/tidak berfungsi, sering menimbulkan genangan.
Akses Air Bersih	Tidak ada jaringan air bersih, kualitas air buruk.
Sanitasi & Air Limbah	Tidak memiliki septic tank, limbah dibuang sembarangan.
Pengelolaan Sampah	Tidak ada TPS, sampah dibuang ke lahan/selokan.
Keteraturan Tata Ruang	Pola bangunan tidak teratur, kepadatan tinggi.

Kondisi Sosial	Partisipasi warga rendah, perilaku hidup bersih kurang.
Kelembagaan Lingkungan	RT/RW kurang aktif, tidak ada pengelolaan lingkungan.

Selain ditinjau dari kriteria fisik seperti kualitas bangunan, kondisi sanitasi, jaringan air bersih, drainase, serta kelengkapan infrastruktur dasar, tingkat kekumuhan suatu kawasan juga dapat dianalisis melalui aspek legalitas lahan dan pertimbangan non-fisik lainnya. Legalitas lahan mencakup kejelasan status kepemilikan, hak guna lahan, serta kepastian hukum terhadap tanah yang ditempati masyarakat. Ketidakjelasan legalitas ini sering menjadi pemicu tumbuhnya permukiman tidak terencana, karena warga cenderung membangun hunian secara mandiri tanpa mengikuti standar konstruksi, tanpa perencanaan tata ruang, dan tanpa dukungan infrastruktur memadai. Kondisi tersebut menjadikan wilayah semakin rentan terhadap kekumuhan dan sulit untuk ditata kembali.

Rendahnya partisipasi masyarakat, minimnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat, lemahnya koordinasi kelembagaan RT/RW, serta keterbatasan ekonomi warga sering kali memperburuk kondisi fisik lingkungan yang sudah tidak layak. Dengan demikian, pemahaman mengenai kekumuhan tidak dapat hanya bergantung pada penilaian fisik, tetapi harus mencakup analisis sosial-lingkungan, legalitas, serta dinamika masyarakat secara menyeluruh.

Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, kawasan Telaga Tujuh RW 01 dan RW 03 di Tanjung Balai Karimun memerlukan kajian yang lebih komprehensif untuk mengidentifikasi faktor penyebab kekumuhan dari berbagai sudut pandang. Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran mendalam mengenai kondisi sosiallingkungan, struktur legalitas lahan, serta faktor pendukung lain yang berkontribusi terhadap

munculnya kekumuhan. Melalui pemahaman tersebut, dapat dirumuskan strategi penanganan yang lebih tepat, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik lokal wilayah Telaga Tujuh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam kajian permukiman kumuh, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya memperbaiki kualitas permukiman, meningkatkan kesejahteraan warga, serta menciptakan lingkungan hunian yang layak dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (mixed methods) yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara terintegrasi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tingkat kekumuhan di kawasan Telaga Tujuh. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui pengukuran indikator fisik permukiman, kondisi prasarana dasar, kepadatan bangunan, serta karakteristik melalui kuesioner terstruktur. Sementara itu, pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam dengan warga, tokoh lokal, dan pengurus RT/RW, serta observasi lapangan guna memahami faktor-faktor non-fisik seperti perilaku hidup bersih dan sehat, dinamika sosial, budaya lokal, dan keberfungsian kelembagaan masyarakat. Integrasi kedua jenis data ini memungkinkan analisis yang lebih kuat dan menyeluruh terhadap penyebab kekumuhan, sekaligus memberikan gambaran yang lebih akurat terkait kondisi riil permukiman. Penggunaan metode campuran ini dipilih karena karakteristik permasalahan kekumuhan yang bersifat multidimensional sehingga memerlukan triangulasi data untuk memperkuat validitas temuan dan merumuskan rekomendasi penanganan yang lebih tepat dan berkelanjutan.

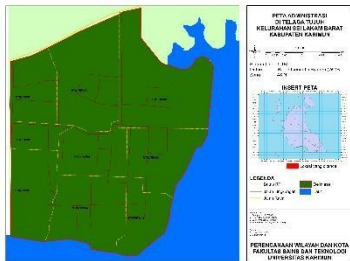
HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wilayah

Telaga Tujuh merupakan salah satu kawasan permukiman yang berada di Kelurahan Sungai

Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Kawasan ini termasuk wilayah pesisir yang berkembang secara alami dan memiliki karakter permukiman padat penduduk dengan keterbatasan ruang.

Secara administratif, Telaga Tujuh memiliki luas wilayah sekitar 16,12



Gambar 1. Peta Adminstrasi Telaga tujuh

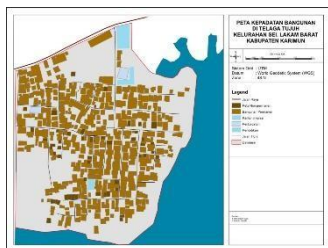
hektar, yang terdiri atas 2 RW dan 9 RT, dengan jumlah penduduk sebanyak 5040 jiwa dan 720 Kepala Keluarga (KK). Kepadatan penduduk yang cukup tinggi ini memberikan tekanan terhadap ketersediaan lahan hunian dan prasarana dasar. Akses utama kawasan berada di sepanjang Jalan Telaga Tujuh yang menjadi jalur aktivitas masyarakat sehari-hari, sebagaimana terlihat pada peta administrasi wilayah.

Persebaran Tingkat Kekumuhan

Persebaran tingkat kekumuhan di Kawasan telaga tujuh pada setiap RT ditentukan berdasarkan hasil analisis setiap kriteria kekumuhan seperti yang tertera pada Tabel 1. Setiap kriteria tersebut akan diberikan penilaian sesuai dengan kondisi eksisting.

Bangunan Gedung

Tingkat kepadatan bangunan di kawasan Telaga Tujuh tergolong sangat tinggi, ditandai oleh jarak antargedung yang sempit dan penggunaan lahan yang hampir seluruhnya tertutup oleh bangunan hunian. Dapat di lihat pada gambar .



Gambar 2. Peta Kepadatan bangunan .

Hampir seluruh bangunan di Kawasan telaga tujuh tidak memiliki keteraturan bangunan dikarenakan Area dengan warna dominan menandakan zona permukiman padat yang berkembang mengikuti akses dan kebutuhan ruang masyarakat, tanpa didukung oleh perencanaan tata bangunan yang terstruktur. Ada akses jalan dengan lebar ±1 meter dan hamper seluruh bangunan menghadap jalan dengan lebar 1 meter dan juga 1,5 meter. Kondisi bangunan Gedung di Kawasan telaga tujuh dapat dilihat pada gamabar berikut:



(a) (b)

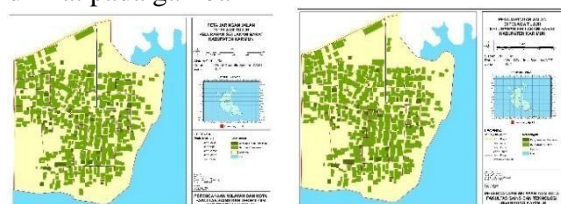
Keterangan:

- (a) Ketidakteraturan bangunan
- (b) Kepadatan bangunan

Kondisi ketidakteraturan bangunan dan kepadatan hunian, sebagaimana ditunjukkan pada gambar (a) ketidakteraturan bangunan dan gambar (b) kepadatan bangunan, menggambarkan rendahnya kualitas tata ruang permukiman. Situasi ini tidak hanya memengaruhi kenyamanan tinggal, tetapi juga meningkatkan risiko lingkungan, seperti kebakaran dan kesulitan akses kendaraan darurat.

Jalan Lingkungan

Terdapat tiga kriteria jalan lingkungan di kawasan telaga tujuh yang digunakan yaitu cakupan pelayanan jalan lingkungan dan kualitas permukaan jalan lingkungan. Gambaran kondisi jalan lingkungan dapat dilihat pada gambar



dibawah ini

- (a) (b)

Keterangan:

- (a).Peta jenis jalan
 (b) Peta jenis kerusakan jalan

Kondisi jalan lingkungan di Jalan Telaga Tujuh menunjukkan bahwa total panjang jalan eksisting mencapai 3.660 meter, yang terdiri atas jalan aspal sepanjang 747 meter (20,4%), jalan semen sepanjang 2.573 meter (70,3%), dan jalan tanah sepanjang 340 meter (9,3%). Dominasi jalan semen menunjukkan bahwa sebagian besar jaringan jalan telah memiliki konstruksi permanen, namun keberadaan jalan tanah masih mencerminkan keterbatasan kualitas prasarana pada beberapa segmen jalan lingkungan.

Dari aspek kualitas permukaan jalan, panjang jalan yang berada dalam kondisi rusak mencapai 1.056 meter atau 28,85% dari total jaringan jalan lingkungan, yang seluruhnya merupakan jalan semen. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya tingkat kenyamanan dan aksesibilitas lingkungan, sehingga diperlukan upaya peningkatan kualitas konstruksi dan pemeliharaan jalan lingkungan di kawasan Jalan Telaga Tujuh.



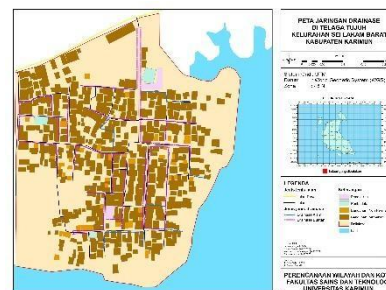
(c)

Keterangan:

- a.Jalan Aspal
 b.Jalan Semen/Beton
 c.Jalan Kayu

Drainase Lingkungan

Jaringan drainase di Jalan Telaga Tujuh, Kelurahan Sei Lakam Barat, Kabupaten Karimun terdiri atas drainase alami dan drainase buatan yang penyebarannya mengikuti pola jaringan jalan serta kepadatan bangunan permukiman. Drainase buatan umumnya terdapat pada ruas jalan utama dan jalan lingkungan dengan tingkat kepadatan bangunan tinggi, sedangkan drainase alami berada di bagian tepi kawasan dan berfungsi sebagai saluran pembuangan akhir menuju laut. Bisa di liat pada gambar peta dibawah

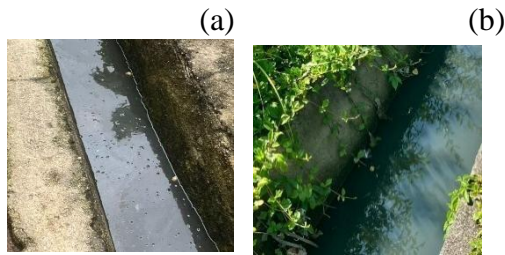


Gambar 3. Aliran Drainase

terdapat 9 RT yang tersebar dalam 2 RW yang masih mengalami permasalahan genangan, dengan total luas kawasan terdampak genangan mencapai 4,39 ha. Kondisi genangan tersebut dipengaruhi oleh saluran drainase lingkungan yang tidak terawat dan belum berfungsi secara optimal. Panjang jalan lingkungan yang belum tercakupi oleh jaringan drainase mencapai 5.214 meter atau sebesar 51,06%, menunjukkan tingkat ketidakterediaan drainase yang relatif tinggi. Selain itu, dari total panjang saluran drainase sebesar 5.002 meter, sepanjang 2.555 meter berada dalam kondisi konstruksi rusak. Kondisi drainase lingkungan di Jalan Telaga Tujuh disajikan pada Gambar

- (a) (b)





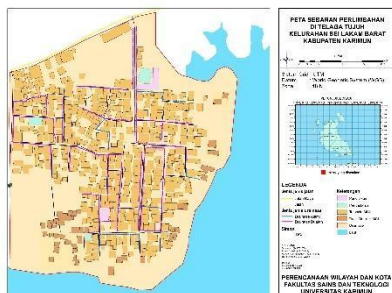
Keterangan :

- (a) Drainase yang ada di pemukiman tepi laut
- (b) Drainase yang ada di daratan

Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa banyak saluran drainase mengalami penyumbatan akibat sampah dan sedimen. Kondisi ini menyebabkan aliran air tidak lancar dan sering menimbulkan genangan, terutama saat hujan deras. Genangan air tersebut tidak hanya memperburuk kondisi jalan, tetapi juga menurunkan kualitas lingkungan permukiman secara keseluruhan.

Pengelolaan Air Limbah

Pengelolaan air limbah di kawasan penelitian didasarkan pada dua kriteria utama, yaitu ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah serta sistem pengelolaan yang diterapkan oleh masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa limbah feces umumnya telah dikelola melalui penggunaan septic tank individual. Namun demikian, pengelolaan limbah cair rumah tangga non-feces (grey water) masih belum memadai, di mana sebagian besar masyarakat membuangnya secara langsung ke saluran drainase lingkungan. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas lingkungan permukiman serta meningkatkan risiko pencemaran air dan gangguan kesehatan masyarakat. bisa di liat pada gambar di bawah.



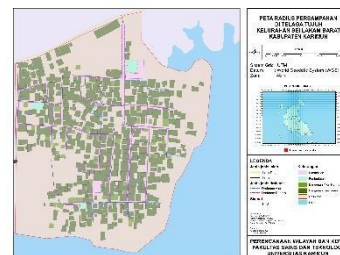
Gambar 4. Sebaran limbah

Kondisi bangunan dan sanitasi di kawasan Jalan Telaga Tujuh menunjukkan bahwa dari total 589 bangunan, sebanyak 538 unit (91,34%) merupakan bangunan permanen dan 51 unit (8,66%) merupakan bangunan non permanen. Dari aspek sanitasi, sebanyak 535 bangunan (90,83%) telah dilengkapi dengan septic tank pribadi maupun komunal, sedangkan 54 bangunan (9,17%) masih belum memiliki septic tank dan melakukan pembuangan limbah domestik secara langsung ke laut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun tingkat permanensi bangunan dan kepemilikan sarana sanitasi relatif tinggi, masih terdapat sebagian bangunan yang memerlukan peningkatan kualitas sistem pengelolaan air limbah guna mendukung terwujudnya lingkungan permukiman yang layak dan berkelanjutan.

Pengelolaan Persampahan

Kondisi pengelolaan persampahan di kawasan Telaga Tujuh dinilai berdasarkan dua kriteria, yaitu ketersediaan sarana pengelolaan persampahan dan sistem pengelolaan persampahan.

Hasil pengamatan lapangan



Gambar 5. Peta Radius Persampahan

menunjukkan bahwa lokasi pembuangan sampah terpusat berada di area lapangan bola yang relatif jauh dari permukiman, khususnya bagi masyarakat RW 01 dan RW 03. Keterbatasan akses terhadap sarana tersebut berkontribusi terhadap terjadinya praktik pembuangan sampah tidak terkelola, termasuk pembuangan sampah ke lingkungan sekitar dan ke perairan laut, yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu ekosistem pesisir. Bisa di liat pada gambar di bawah



Gambar 6. Sampah yang di buang di tepi laut

Proteksi Kebakaran

Terdapat dua kriteria kondisi proteksi kebaran yang digunakan yaitu ketersediaan sarana proteksi kebakaran dan keterjangkauan prasarana proteksi kebakaran. Sebaran kondisi proteksi kebakaran dapat dilihat pada Gambar.



Gambar 7. Bangunan yang Tidak Terakses

100% bangunan di Kawasan telaga tujuh tidak memiliki sarana proteksi kebakaran berupa Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR). Dan terdapat beberapa Rumah yang tidak terjangkau oleh prasarana proteksi kebakaran bangunan seperti pada Gambar



Gambar 8. Bangunan yang Tidak Terakses di tepi laut

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa beberapa bangunan hunian mengalami kesulitan akses bagi kendaraan pemadam kebakaran akibat lebar jalan lingkungan yang sangat terbatas serta jarak antarbangunan yang berdempetan.

Tingkat Kekumuhan

Berdasarkan hasil observasi dan uraian yang telah di jabarkan, diperoleh perhitungan sebagai berikut :

No	Parameter	Sub Kriteria	Point
----	-----------	--------------	-------

			Penilaian		
1	Bangunan dan gedung	Ketidak Beraturan	5		
		Bangunan			
		Tingkat Kepadatan	3		
Bangunan					
		Ketidak sesuaian	1		
		Dengan persyaratan			
		Teknis Bangunan			
2	Jalan Lingkungan	Cakupan pelayanan	1		
		Jalan lingkungan			
		Kualitas Permukaan	3		
Jalan Lingkungan					
3	Penyediaan Air minum	Ketersediaan Akses	1		
		Aman air Minum			
		Tidak terpenuhinya	1		
Kebutuhan air Minum					
4	Koordinasi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan	5		
		Mengalirkan Limpasan			
		Air			
		Ketersediaan Drainase	5		
		Ketidakterhubungan	5		
		Dengan sistem			
		Drainase			
		Tidak terpeliharanya	5		
		sistem Drainase			
		Kualitas Kontruksi			
		Drainase			
5	Pengelolaan air limbah	Sistem pengelolaan	3		
		Air limbah tidak sesuai			
		standar Teknis			
		prasarana dan sarana	3		
		pengelolaan air limbah			
		tidak sesuai standar			
		Teknis			
		6	Pengelolaan persampahan	Prasarana dan sarana	3
				Persampahan tidak	

		sesuai standar	
		teknis	
		Sistem pengelolaan	3
		Persampahan tidak	
		sesuai standar	
		teknis	
		Tidak terpeliharanya	3
		sarana dan prasarana	
7	Potensi Kebakaran	Ketersediaan prasarana	5
		proteksi kebakaran	
		Ketersediaan sarana	5
		proteksi kebakaran	

No	Parameter	Tingkat Klasifikasi
1	Bangunan Gedung	$(5+3+1)/3 = 3$
2	Jalan lingkungan	$(1+3)/2=2$
3	Penyediaan Air minum	$(1+1)/2=1$
4	Drainase Lingkungan	$(5+5+5+5+5)/5=5$
5	Pengelolaan air limbah	$(3+3)/2=3$
6	Pengelolaan Persampahan	$(3+3+3)/3=3$
7	Proteksi kebakaran	$(5+5)/2=5$
Total Keterangan		22
		Kumuh Sedang

Berdasarkan Indikator dan kriteria Permukiman kumuh dalam permen PU

NO 14 Tahun 2018, tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh di simpulkan bahwa permukiman yang

STRATEGI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH

Kawasan Telaga Tujuh Kelurahan Sungai Lakam Barat

Berdasarkan hasil analisis kondisi eksisting di kawasan Telaga Tujuh, permasalahan kekumuhan yang terjadi tidak hanya bersumber dari aspek fisik lingkungan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan kelembagaan masyarakat. Oleh karena itu, strategi penanganan permukiman kumuh perlu dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, dengan memperhatikan karakteristik lokal kawasan serta melibatkan berbagai pihak terkait. Strategi penanganan yang dirumuskan dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam tiga aspek utama, yaitu penanganan fisik lingkungan, penanganan sosial masyarakat, dan penguatan kelembagaan.

Kawasan Telaga Tujuh Kelurahan Sungai Lakam Barat

Berdasarkan hasil analisis kondisi eksisting di kawasan Telaga Tujuh, permasalahan kekumuhan yang terjadi tidak hanya bersumber dari aspek fisik lingkungan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan kelembagaan masyarakat. Oleh karena itu, strategi penanganan permukiman kumuh perlu dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, dengan memperhatikan karakteristik lokal kawasan serta melibatkan berbagai pihak terkait. Strategi penanganan yang dirumuskan dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam tiga aspek utama, yaitu penanganan fisik lingkungan, penanganan sosial masyarakat, dan penguatan kelembagaan.

Strategi Penanganan Fisik Lingkungan

Strategi penanganan fisik lingkungan difokuskan pada perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman yang menjadi indikator utama kekumuhan di kawasan Telaga Tujuh. Salah satu prioritas utama adalah penataan dan peningkatan kualitas jalan lingkungan,

mengingat masih terdapat sekitar 28,85% jalan dalam kondisi rusak. Perbaikan jalan beton yang mengalami kerusakan perlu dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kualitas konstruksi dan integrasi dengan sistem drainase,

sehingga kerusakan tidak kembali terjadi dalam jangka waktu singkat.

Selain itu, penataan bangunan gedung juga menjadi bagian penting dalam strategi fisik. Kepadatan bangunan yang tinggi dan ketidakteraturan tata letak perlu ditangani melalui pengendalian pemanfaatan ruang, penataan ulang bangunan secara bertahap, serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni. Upaya ini dapat dilakukan melalui program bantuan perbaikan rumah dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Perbaikan drainase lingkungan juga menjadi strategi utama untuk mengurangi genangan air dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Normalisasi saluran drainase, pembersihan rutin, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke saluran air perlu dilakukan secara berkelanjutan. Dengan sistem drainase yang berfungsi dengan baik, risiko genangan, kerusakan jalan, dan pencemaran lingkungan dapat diminimalkan.

Strategi Penanganan Sosial Masyarakat

Selain perbaikan fisik, penanganan permukiman kumuh di Telaga Tujuh juga memerlukan pendekatan sosial yang berfokus pada perubahan perilaku dan peningkatan partisipasi masyarakat. Rendahnya kesadaran lingkungan dan kebiasaan membuang sampah sembarangan menunjukkan perlunya edukasi yang berkelanjutan terkait perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Strategi ini dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan lingkungan, sosialisasi kebersihan, serta penguatan budaya gotong royong di tingkat RT dan RW. Keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan kebersihan lingkungan, seperti kerja bakti rutin dan pengelolaan sampah berbasis komunitas,

diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan tempat tinggal.

Pemberdayaan masyarakat juga perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas warga dalam menjaga dan memelihara infrastruktur yang telah dibangun. Dengan demikian, hasil penataan lingkungan tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Strategi Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan menjadi strategi pendukung yang sangat penting dalam penanganan permukiman kumuh di kawasan Telaga Tujuh. Peran RT dan RW perlu ditingkatkan sebagai ujung tombak pengelolaan lingkungan permukiman. Penguatan kelembagaan dapat dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara pengurus RT/RW, kelurahan, dan pemerintah daerah dalam perencanaan serta pelaksanaan program penataan kawasan.

Selain itu, diperlukan sistem pengelolaan lingkungan yang lebih terorganisasi, termasuk pengelolaan persampahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran. Penyediaan sarana dasar seperti tempat penampungan sampah sementara dan alat proteksi kebakaran perlu dibarengi dengan pembentukan kelompok masyarakat yang bertanggung jawab terhadap operasional dan pemeliharannya.

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya menjadi kunci keberhasilan strategi penanganan permukiman kumuh. Dengan adanya kelembagaan yang kuat dan partisipatif, upaya penataan kawasan Telaga Tujuh diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata

Kesimpulan

Berdasarkan hasil perumusan strategi penanganan permukiman kumuh di Kawasan Telaga Tujuh, Kelurahan Sungai Lakam Barat, dapat disimpulkan bahwa permasalahan kekumuhan di kawasan ini bersifat **kompleks dan multidimensional**, tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan fisik lingkungan, tetapi juga oleh **aspek sosial dan kelembagaan masyarakat**. Oleh karena itu, penanganan yang

hanya berfokus pada perbaikan fisik tanpa disertai perubahan perilaku masyarakat dan penguatan kelembagaan lokal tidak akan memberikan dampak yang berkelanjutan.

Strategi penanganan fisik lingkungan memiliki **kepentingan utama dan mendesak** bagi Telaga Tujuh, mengingat masih tingginya persentase kerusakan jalan lingkungan, ketidakteraturan bangunan, serta sistem drainase yang belum berfungsi optimal. Perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan kualitas bangunan hunian menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan aksesibilitas, mengurangi genangan, serta menciptakan lingkungan permukiman yang lebih layak huni dan sehat bagi masyarakat setempat.

Namun demikian, keberhasilan penanganan fisik tersebut sangat bergantung pada strategi penanganan sosial masyarakat. Rendahnya kesadaran lingkungan dan partisipasi warga di Telaga Tujuh menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan pemberdayaan masyarakat merupakan kebutuhan strategis. Melalui peningkatan kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat, penguatan budaya gotong royong, serta keterlibatan aktif warga dalam pemeliharaan lingkungan, hasil penataan fisik dapat dijaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Selain itu, penguatan kelembagaan lokal menjadi elemen kunci dalam menjamin keberlanjutan program penanganan permukiman kumuh di Telaga Tujuh. Peran RT, RW, dan kelurahan sebagai pengelola lingkungan perlu diperkuat melalui koordinasi yang efektif dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya. Kelembagaan yang kuat dan partisipatif akan memastikan adanya pengelolaan lingkungan yang terorganisasi, termasuk dalam pengelolaan persampahan, pemeliharaan infrastruktur, dan mitigasi risiko kebencanaan.

Dengan demikian, strategi penanganan permukiman kumuh di Kawasan Telaga Tujuh harus dipandang sebagai upaya terpadu dan berkelanjutan yang mengintegrasikan perbaikan fisik lingkungan, perubahan sosial masyarakat, dan penguatan kelembagaan. Strategi ini memiliki kepentingan strategis bagi

Telaga Tujuh karena tidak hanya bertujuan mengurangi tingkat kekumuhan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat ketahanan lingkungan permukiman, serta mendukung pembangunan kawasan yang lebih tertata, sehat, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- As' ari, R., & Fadjarajani, S. (2018). Penataan Permukiman Kumuh Berbasis Lingkungan. *Jurnal Geografi: Media Informasi Pengembangan Dan Profesi Kegeografian*, 15(1).
- Haqiqi, F., Yusmalina, I., & Dolariana, W. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Aset Tetap Dan Beban Penyusutan Terhadap Pengelolaan Laporan Keuangan Tahun 2017-2019 (Studi Kasus Pada Kantor Bps Kabupaten Karimun). *Jurnal Manajemen Riset Dan Teknologi*, 125–139.
- Indonesia, P. R. (2017). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Republic of Indonesia Law*, (36).
- Nursyahbani, R., & Pigawati, B. (2015). Kajian Karakteristik Kawasan Pemukiman Kumuh di Kampung Kota (Studi Kasus: Kampung Gandekan Semarang). *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 4(2), 267–281.